

Dialog

Vol. 37, No. 1, Juni 2014

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Ir. Sunarini, M.Kom.

SEKRETARIS REDAKSI

Taufik Budi Sutrisno, S.Sos., S.IPI

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)

Prof. Dr. M. Hisyam (Sejarah)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)

Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Sosiologi Hukum)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)

Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D (Sejarah dan Kebudayaan Islam)

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag (Kehidupan Keagamaan)

Prof. Dr. Imam Tholkhah (Pendidikan Agama)

Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)

Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih Mushaf)

Dr. Lukmanul Hakim

REDAKTUR PELAKSANA

Dr. Muhammad Rais, M.A

SEKRETARIAT REDAKSI

Muh. Ihyakulumuddin, S.Si

Abdul Syukur, S.Kom

Wawan Hermawan S.Kom

Lisa Habiba, S.E.

Sri Hendriani, S.Si.

DESAIN GRAFIS

Abas Al-Jauhari, M.Si

Arif Gunawan Santoso, S.Si.

ALAMAT REDAKSI

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp/Fax. (021) 3920688-3920662

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

Hubungan antara agama dan negara merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut karena aspek-aspek kehidupan dalam beragama memberikan banyak pengaruh pada kehidupan bernegara. Oleh karena itulah maka tidak mengherankan apabila diskursus tentang agama dan negara merupakan diskursus yang tidak pernah selesai karena adanya dialektika tentang kekuasaan yang dimiliki oleh negara sebagai pengatur kehidupan bernegara dalam suatu masyarakat atau bangsa di satu sisi, dengan wewenang agama dalam mengatur kehidupan masyarakat di sisi lain. Realitas ini menimbulkan persinggungan yang terkadang cukup tajam dalam kehidupan bermasyarakat terutama berkaitan dengan hubungan warga masyarakat yang berbeda agama di suatu negara.

Tulisan-tulisan dalam jurnal kali ini membahas pelbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan dan hubungan antara manusia dan sesamanya yang dalam bahasa agama disebut *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Tulisan-tulisan tersebut membahas tentang peran agama dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun sosial. Misalnya dalam tulisan pertama ketika Sajari membahas tentang dzikir sebagai makanan spiritual Sang Sufi, sesungguhnya menyampaikan pesan pentingnya hubungan antara hamba dan Tuhan dijaga lewat media dzikir. Kemudian, pembahasan-pembahasan lain tentang hubungan antar umat beragama di Indonesia misalnya yang tertuang dalam tulisan tentang fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI, oleh Rumadi, *Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama dan Renungan Dewasa Ini*, oleh Fachry Ali, *Mencegah Eskalasi Konflik Keagamaan di Jawa Tengah* oleh Husni Mubarak, *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* oleh Nuruddin, *Nasionalisme dalam Pandangan Etnik Minoritas Islam Tionghoa di*

Yogyakarta oleh Muryanti serta tiga tulisan akhir yaitu tentang *Sanksi atas UUU Perkawinan di Negara-negara Islam* oleh Atho Mudzhar, *Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat* oleh Ali Romdhoni dan *Meninggalkan Jalan Teror* oleh Gazi Saloom, secara keseluruhan membahas hubungan diantara warga masyarakat, baik dalam bingkai agama yang sama maupun agama yang berbeda dalam bermasyarakat dan bernegara.

Tulisan-tulisan di atas membahas tentang bagaimana agama dipahami oleh para pemeluknya dalam konteks politik, sosial dan budaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Tulisan-tulisan tersebut di atas memberikan gambaran dan analisis terjadinya dialektika yang amat dinamis dalam memahami agama. Dialektika yang amat dinamis ini selanjutnya juga menjadi benturan-benturan yang cukup tajam ketika pemahaman-pemahaman tersebut dituangkan secara hukum dalam suatu aturan. Kata agama dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Oleh karena itulah, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian agama didefinisikan secara sederhana, yaitu dari kata “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau. Dengan demikian secara ringkas agama berfungsi untuk memberikan ketenangan dalam diri pengikutnya agar tidak kacau, baik dalam hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta, maupun dengan sesamanya dan juga alam sekitarnya.

Maksud yang juga relevan dengan tujuan agama untuk tidak kacau dan memberikan ketenangan juga disebutkan dalam konteks agama Islam yaitu *din*, suatu konsep yang dapat berarti hutang yang mengikat. *Din* dalam pengertian Islam tidak hanya mengikat atau hutang yang harus dipenuhi, namun juga menuntut adanya kewajiban dari para pengikutnya untuk melaksanakan ajaran agama sebagai bentuk pemenuhan hutang yang menjadi kewajiban tersebut. Artinya agama mengikat

hubungan seseorang dengan Tuhan Sang Pencipta. Senada dengan hal ini, kata *religion* yang berarti agama juga memiliki akar kata *religare* yang berarti mengikat. Dalam konteks ini, agama sebagai suatu ikatan antara hamba dan Tuhannya dalam kehidupan diatur dalam ajaran-ajaran agama. Ajaran-ajaran agama inilah yang selanjutnya menjadi pedoman manusia dalam kehidupan. Dalam ajaran agama Islam, pedoman Tuhan diturunkan pada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an yang dilengkapi dengan hadis sebagai bagian integral yang menjelaskan Al-Qur'an.

Adapun negara merujuk pada suatu wilayah yang memiliki rakyat dan pemerintahan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara hukum untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sehubungan dengan hal inilah, maka masyarakat sebagai anggota suatu negara juga terikat dengan aturan-aturan hukum negara di satu sisi, sementara di sisi lain juga terikat dengan ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus kehidupan agama di Indonesia terutama antara Islam dan negara terkadang terjadi benturan yang berakar dari pemahaman mengenai bagaimana seharusnya Islam diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benturan-benturan pemahaman yang terdapat dalam masyarakat Islam sendiri memiliki dampak dalam hubungan sosial dan politik dalam masyarakat karena pemahaman-pemahaman yang beragam tersebut berpengaruh dalam kebijakan politik pemerintah yang dituangkan dalam peraturan hukum.

Berkaitan dengan hukum sebagai bagian penting dari pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, tulisan Atho Mudzhar tentang pentingnya melakukan perbandingan dalam melihat penerapan hukum Islam di negara-negara lain menjadi amat urgen dilakukan. Perbandingan menjadi amat penting untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas serta mendalam mengenai suatu persoalan. Dalam tulisannya tentang sanksi atas

pelanggaran undang-undang perkawinan dalam Islam misalnya, Atho Mudzhar menekankan pentingnya melakukan penelitian perbandingan untuk kepentingan pengembangan dan pembaruan hukum Islam dalam perkawinan.

Tulisan Ali Romdhoni mengulas tentang strategi pesantren dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Jika pesantren tidak mampu menjawab tantangan zaman, maka tidak menutup kemungkinan pesantren akan kehilangan peminatnya.

Tulisan-tulisan dalam edisi jurnal kali ini menjadi amat penting untuk dicermati dalam kaitannya dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu munculnya radikalisme agama yang menggugat eksistensi negara yang berujung pada tindakan-tindakan yang dianggap teror, ataupun tindakan-tindakan yang belum merupakan teror namun menggugat eksistensi negara, lalu munculnya konflik-konflik keagamaan yang didasarkan pada pemahaman-pemahaman yang dilegitimasi dalam suatu undang-undang atau peraturan.

Selain itu, relasi antarumat beragama yang seringkali menimbulkan ketegangan dan konflik juga menjadi penting dicermati dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini misalnya fatwa-fatwa dari NU, Muhammadiyah dan MUI tentang isu-isu perkawinan muslim dan non muslim, kewarisan, persaksian, dan tentang mengucapkan selamat natal. Kemudian kajian tentang kelompok agama dan kasus bagaimana konflik tersebut dapat dicegah, seperti tulisan Husni Mubarak tentang kasus konflik di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, serta persoalan pemahaman keagamaan yang tentu saja secara formal bertumpu pada lembaga pendidikan. Dalam hal ini tulisan Nuruddin tentang *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* menjadi penting dicermati dan dielaborasi lebih lanjut, meskipun dalam tulisannya tidak secara rinci membahas tentang dampak pemahaman keagamaan yang diajarkan namun menjadi penting untuk melihat posisi lembaga pendidikan Islam (madrasah) dalam

persaingan global yang akan memberikan dampak dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kasus Indonesia yang amat penting dicatat adalah bahwa hubungan agama dan negara seharusnya dapat terus ditingkatkan lebih harmonis dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat Indonesia memiliki beragam agama, suku bangsa, adat istiadat dan kepercayaan. Oleh karena itulah, persoalan-persoalan tersebut menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian untuk kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang lebih baik, toleran dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut, konflik-konflik yang timbul dari pemahaman keagamaan

selayaknya dapat diberi solusi yang tepat dengan mengetahui akar-akar permasalahannya.

Tulisan-tulisan tersebut di atas diharapkan dapat menjadi pemicu elaborasi pemikiran yang lebih berkembang, jernih dan analitik serta solutif dalam menghadapi problematika yang muncul terkait hubungan antara agama dan negara yang memiliki dimensi luas dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga sejumlah tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selamat membaca.

Salam hormat
Redaksi

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 37, No. 1, Juni 2014

DIMYATI SAJARI

Dzikir: Makanan Spiritual Sang Sufi: 1-12

RUMADI

Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia: Fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI tentang Relasi Muslim dan Non-Muslim: 13-32

FACHRY ALI

Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama dan Renungan Dewasa Ini: 33-48

HUSNI MUBAROK

Mencegah Eskalasi Konflik Keagamaan: Studi Kasus Konflik Natal Bersama di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah: 49-60

NURUDDIN

Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bingkai Penelitian: 61-74

MURYANTI

Nasionalisme dalam Pandangan Etnik Minoritas di Yogyakarta: Studi Kasus Anggota Perhimpunan Indonesia-Tionghoa/INTI Yogyakarta: 75-86

M. ATHO MUDZHAR

Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara: 87-96

ALI ROMDHONI

Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat: 97-108

GAZI SALOOM

Meninggalkan Jalan Teror: Antara Deradikalisasi dan *Disengagement*: 109-120

BOOK REVIEW

MUHAMMAD ISNUR

Potret Keberhasilan Pemolisian di Indonesia: 121-126

**NASIONALISME DALAM PANDANGAN ETNIK
MINORITAS DI YOGYAKARTA: STUDI KASUS
ANGGOTA PERHIMPUNAN INDONESIA -
TIONGHOA/INTI YOGYAKARTA**

MURYANTI*)

ABSTRAK

Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia menunjukkan fenomena pluralisme dan multikultural yang tidak bisa dinegasikan. Secara kuantitatif, etnis Tionghoa merupakan minoritas di tengah kemajemukan etnik yang ada di Indonesia. Akan tetapi, mereka menguasai sekitar 70-80 % perekonomian Indonesia. Nasionalisme yang ditunjukkan oleh Etnis Tionghoa berbeda dengan bangsa Indonesia secara umum. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia ditunjukkan kepada dunia Internasional dengan berbagai macam prestasi internasional yang menggunakan nama bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sangat plural memiliki berbagai macam pernyataan sikap dan tindakan nasionalismenya. Sehingga yang menjadi permasalahan bukan pada bentuk nasionalismenya, akan tetapi sikap dan tindakan nasionalisme sebagai bangsa Indonesia, dimanapun dan sampai kapanpun sebagai orang Indonesia. Tulisan ini hendak mengkaji berbagai macam bentuk tindakan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa melalui organisasi INTI (Perhimpunan Indonesia-Tionghoa).

KATA KUNCI:

Etnis Tionghoa, Nasionalisme, Pluralisme, Indonesia

ABSTRACT

The existence of Chinese descendants in Indonesia is obviously the parcel of well-nurtured pluralism and multiculturalism in this country. Chinese group in Indonesia remains minority among the population. However, this group reins around 70-80% Indonesian economic sectors. In terms of the feeling of nationalism, this group express it differently from other Indonesians. They obtained international recognition and yet they still acclaimed themselves as Indonesians. Plural Indonesian people have various responses and attitude towards this claim. Therefore, the main issue is not the type of nationalism, but is in the attitudes as Indonesian nation wherever and whenever it takes. This paper investigates some activities done by Chinese descendants through their organizations called INTI (Indonesian-Tionghoa Association).

KEY WORDS:

Tionghoa Ethnic, Nasionalism, Pluralism, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia merupakan bagian dari fenomena keberadaan

etnis yang sampai saat ini masih menyisakan berbagai macam konflik sosial dari masa ke masa. Pada masa kolonialisme Belanda, kondisi sosial masyarakat nusantara, stratifikasi sosial-ekonomi secara formal mengikuti garis ras, budaya dan agama. Belanda menduduki posisi penguasa dalam bidang politik dan ekonomi,

*) Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga. Jl. Marsda Adisucipto No. 1 Yogyakarta. Alamat Email: newsyant@yahoo.com

*) Tulisan diterima Februari 2014, direvisi April 2014, disetujui Mei 2014

sehingga menjadi lapisan yang termakmur. Golongan Keturunan China, Timur Asing yang menjadi media perantara dalam proses penghisapan bumi dan bangsa pribumi, berada di tengah. Pada kerak stratifikasi sosial adalah golongan pribumi yang hampir secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai petani (*peasant*) Islam dengan produktivitas kerja yang rendah, kecuali sedikit kelompok aristokrat mereka.¹

Dominasi dan peranan ekonomi Cina di Perantaraan (Huakiau) seringkali dituduh sebagai akar penyebab munculnya berbagai ketegangan sosial-politik di negara-negara Asia Tenggara. Kehadiran dan perilaku kelompok etnis Cina dianggap sebagai sumber masalah serius yang tercermin dari berbagai karya.² Hal tersebut menimbulkan *sinophobia* yang tampaknya dirangsang oleh prasangka etnis rasial yang meluas dan dipertajam oleh pemisahan struktural serta tendensi eksklusivitas. Cina perantaraan, kelompok minoritas secara demografis, memenangkan kompetisi ekonomi atas bumiputera dan menggeser kelompok mayoritas (demografis dan politik) ke posisi minoritas dan pinggiran. Realitas ini menciptakan kondisi kondusif bagi sentimen dan permusuhan terhadap etnis Cina.

Pada dasarnya ada perbedaan dalam berbagai hal antara orang Cina dengan Bumiputra. Misalnya, bahasa, gaya hidup, adat istiadat, memperingati hari raya dan aktivitas sosial, juga mengenai cara berpikir, sistem nilai budaya, sikap dan penilaian mereka terhadap karya dan keuntungan, cara-cara yang ditempuh guna menarik keuntungan material serta mobilitas sosial. Berbagai perbedaan tadi erat kaitannya dengan latar belakang perbedaan kebudayaan. Sehingga sering menimbulkan *prejudice* (prasangka), apakah itu menyangkut intelegensia, kesehatan, kesucian atau moralitas. Dari perbedaan itu sangat sukar untuk mengatakan hal-hal apakah yang biasanya

menyebabkan kurang harmonis hubungan antara mayoritas dan minoritas.³

Secara umum dapat dikatakan bahwa berdasarkan keturunan, di Indonesia terdapat dua klasifikasi atas orang Cina: yaitu peranakan dan totok. Klasifikasi ini terutama berdasarkan atas kelahiran seseorang dari sebuah perkawinan atau kelahiran generasi di atasnya. Orang Cina peranakan adalah mereka yang lahir dari suatu perkawinan yang salah satu atau kedua orang tuanya atau generasi di atasnya adalah bumiputra. Lazimnya, pola perkawinan yang terjadi adalah antara laki-laki Cina dengan perempuan bumiputra. Sebaliknya orang Cina totok menunjukkan pada seseorang yang dilahirkan dari suatu perkawinan sesama orang Cina. Maksudnya, kedua orang tua mereka atau generasi di atasnya belum atau tidak pernah melakukan perkawinan campuran.

Berdasarkan hubungan mayoritas dan minoritas di Asia Tenggara, Wang Gung Wa mengklasifikasikan orang Cina menjadi 3 kelompok: (1) jumlahnya besar, berorientasi pada RRC karena status kewarganegaraan dan aktivitas mereka yang ditentukan status tersebut yang disebut Cina chauvinistik. (2) orang-orang Cina yang menerima dan melihat pentingnya ia loyal kepada negara tempat bermukim, namun kepentingan ekonomi kelompok ini masih berlindung pada identitas mereka sebagai orang Cina. (3) mereka mengidentifikasi diri kepada negara yang menjadi tempat bermukim. Mereka memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada bumiputra dan menyiapkan diri untuk mengarungi kehidupan dan kematiannya di negeri yang disebut sebagai negeri sendiri. (4) orang-orang Cina yang secara menyeluruh terasimilasi ke dalam masyarakat bumiputra.⁴

Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Cina di Indonesia terbagi menjadi tiga orientasi: (1) kaum Cina nasionalis yang diwakili oleh kelompok Sin Po. (2) Mereka yang berkooperasi dengan penjajah Belanda yang diwakili kelompok Chung Hua Hui dan, (3) Mereka yang bekerjasama dengan kaum nasionalis Indonesia dan anti Kolonialis, Jepang dan Belanda, yang diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia. Setelah kemerdekaan, jika dipandang

³ Gungwu Wang, *A Short History of The Nanyang Chinese* (Singapore: Eastern University, 1959). hal. 268

⁴ Ibid, hal. 270

¹ W.F Wertheim, "*Indonesia Society in Transition*" dalam Amri Marzali : *Kesenjangan Sosial Ekonomi antar golongan Etnis (kasus China-Pribumi di Indonesia)*, Majalah PRISMA, no.12 tahun 1994

² Victor Purcell, "*The Chinese in Southeast Asia*" dalam Harlem Siahaan, *Konflik dan Perlawanan: Kongsi Cina di Kalimantan Barat. 1770-1854*, dalam Majalah PRISMA, no.12 tahun 1994

dari segi asimilasi dan akulturasi, masyarakat Cina digolongkan menjadi: (1) Golongan yang berorientasi pada RRC/Taiwan. Pada umumnya mereka adalah generasi tua dan mengalami pendidikan Sekolah Cina di masa penjajahan atau setelah kemerdekaan. (2) Golongan yang berorientasi pada Belanda/ Barat. (3) Golongan yang berorientasi pada Indonesia.

Sejumlah penulis berpendapat sangat sukar untuk mengklasifikasikan seseorang di 'Indonesia sebagai orang Cina, sebaliknya ada peneliti lain, Wilmot (1960:15) tidak ada keraguan untuk mengidentifikasi seseorang di Indonesia sebagai orang Cina. Sekalipun sebagian besar laki-laki Cina telah kawin dengan perempuan bumiputra, terutama banyak terjadi sebelum Perang Dunia II (PD II). Anak-anak hasil perkawinan campuran itu hampir semuanya menjadi Cina. Banyak diantara keturunan campuran itu terasimilasi dan terakulturasi dalam keluarga Cina dan mempunyai nama Cina. Sulitnya membuat klasifikasi orang Cina di Indonesia karena banyak orang tua atau generasi di atas mereka yang melakukan perkawinan campuran dan tidak lagi menulis serta berbahasa Cina. Mereka juga telah melepaskan kebiasaan melakukan pemujaan terhadap nenek moyang. Karena itu, kriteria yang paling tepat untuk mendefinisikan seseorang, apakah ia termasuk orang Cina atau bukan, adalah identifikasi diri atau identifikasi sosial. Dengan demikian, klasifikasi itu bukan didasarkan atas status kewarganegaraan, latar belakang budaya, hukum ataupun ras.

Banyak orang Cina di Indonesia yang tidak mau disebut sebagai orang Cina. Mereka lebih mengidentifikasikan dirinya sebagai peranakan, yang berarti dilahirkan di daerah setempat, tetapi bukan penduduk asli, atau dilahirkan di daerah setempat dari darah Cina orang asing. Pada dasarnya mereka adalah orang Cina yang berbahasa Indonesia. Istilah peranakan yang digunakan selama ini juga kurang tepat, misalnya dipakai untuk menyebut orang Cina yang lahir di Indonesia tanpa memandang latar belakang kebudayaannya. Seorang Cina kelahiran Indonesia, tidak otomatis tergolong peranakan. Jika mereka tidak menguasai bahasa Cina, kemudian mereka sehari-hari di rumah hanya menggunakan bahasa Indonesia, maka mereka dapat disebut

sebagai peranakan. Sebaliknya, meskipun mereka lahir di Indonesia, tetapi dalam kehidupan sehari-hari di rumah menggunakan bahasa Cina, mereka termasuk klasifikasi totok. Artinya orang asing yang lahir di negara lain dan berdarah asing.⁵

Menurut Suryadinata, meskipun orang Cina telah memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), berbagai simbol identifikasi nasional Indonesia masih sukar diserap dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kebudayaan dari negeri leluhur mereka dalam membentuk identitas diri mereka sebagai orang Cina.⁶ Kuatnya orientasi dan identifikasi diri orang Cina terhadap negeri leluhur, menyebabkan kurangnya *sense of belonging* dan loyalitas mereka terhadap negara Indonesia. Dengan demikian, permasalahan utamanya adalah bagaimana caranya menimbulkan *sense of belonging*, loyalitas dan solidaritas tersebut dalam kehidupan nyata. Salah satu upaya untuk menumbuhkannya adalah dengan melakukan asimilasi⁷, yang di kalangan orang Cina merupakan konsekuensi yang mendasar dan logis dari pemberian status WNI bagi orang Cina, sekaligus dimaksud untuk mempermudah proses asimilasi dengan seluruh rakyat Indonesia. Apakah asimilasi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai Etnis Tionghoa memiliki rasa nasionalisme dan meleburkan diri dengan bangsa Indonesia? Tulisan ini hendak mengkaji tentang kiprah organisasi INTI yang secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai spirit nasionalisme keindonesiaan.

B. PERHIMPUNAN INDONESIA TIONGHOA (INTI)

Perhimpunan INTI merupakan salah satu organisasi masyarakat Etnis Tionghoa di Indonesia. Organisasi berbasis etnis ini didirikan pada tanggal 5 Februari 1999 di Jakarta untuk

⁵ Skinner, G. William, *Report on The Chinese in Southeast Asia* (New York: South East Asia Program Department of Far Eastern Studies, 1950)

⁶ Hari Poerwanto, *Orang Cina Khek dari Singkawang* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hal. 1

⁷ Asimilasi adalah proses dan hasil pertemuan dua kebudayaan atau lebih. Ada kalanya istilah asimilasi dan akulturasi dipakai dalam pengertian yang sama dan tidak jarang tumpang tindih

waktu yang ditentukan lamanya.⁸ Organisasi ini bersifat kebangsaan sesuai dengan mukadimah UUD 1945, bebas, egaliter, pluralis, inklusif, demokratis, tidak bernaung atau mengikatkan diri kepada salah satu partai politik dan terbuka bagi semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang setuju pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta tujuan Perhimpunan INTI. Adapun susunan pengurusnya adalah : Ketua, Budi S. Tanuwibowo, Wakil Ketua 1, Indra Wahidin, Wakil Ketua 2, OJB Ohim Sindudisastra, Sekretaris 1, Lily Tan dan Sekretaris 2, Christiandy Sanjaya

Pendiri organisasi INTI terdiri dari 17 orang yang muncul dari berbagai kalangan: Peranakan, Totok, Kristen, Katholik, Buddha, Konghucu, Dao, pengusaha, intelektual, pengamat sosial dan politik dan sebagainya. Mereka sepakat bahwa “masalah Tionghoa” yang merupakan peninggalan Belanda dan rezim Orde Baru harus diselesaikan sampai tuntas, walaupun akan memakan waktu satu, dua bahkan tiga generasi. Menurut mereka untuk mewujudkan visi dan tujuan tersebut etnis Tionghoa harus mengintegrasikan diisi secara total ke dalam *mainstream* atau arus besar bangsa Indonesia tanpa harus menanggalkan seluruh identitas keTionghoannya, karena etnis Tionghoa merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Etnis Tionghoa harus secara aktif bergandengan tangan dengan seluruh komponen bangsa lainnya untuk bersama-sama membangun Indonesia yang demokratis dan bersih dari segala bentuk diskriminasi, kemiskinan, korupsi, kebodohan dan ketidakadilan. Bangsa dan negara Indonesia harus menjadi bangsa dan negara yang berdaulat penuh, berpegang teguh pada hukum, sejahtera dan berperadaban tinggi sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia yang semakin mengglobal. Hanya di dalam masyarakat itulah diskriminasi dalam segala bentuknya bisa benar-benar bersih dari bumi Indonesia dan “permasalahan” Tionghoa lenyap untuk selama-lamanya.⁹

⁸ *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga INTI*, (Jakarta, 2008).

⁹ *Buku Kenangan: Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia-Tionghoa: Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan, 1999-2009* (Jakarta: Perhimpunan INTI, 2009), hal. 67

Visinya menjadi organisasi yang maju, modern, bercitra Internasional, berorientasi pada Kebangsaan Indonesia, menghargai hak asasi manusia, egaliter, pluralis, inklusif, demokratis dan transparan. Dengan misinya berperan aktif dalam dinamika proses pembangunan bangsa, antara lain penuntasan masalah Tionghoa di Indonesia, menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang kokoh, rukun bersatu dalam keharmonisan, bhinneka, saling menghargai dan saling percaya. Fokus perjuangan INTI terbagi menjadi 4 bidang: 1). Bidang Politik dan Hukum: Perhimpunan INTI menentang segala bentuk diskriminasi terhadap setiap warga negara Indonesia, apapun latar belakang identitasnya, baik ras, etnis, gender, agama, keyakinan maupun kedudukan sosialnya. Perhimpunan ini memperjuangkan penyebaran paham Nasionalisme Modern, bukan paham Etno Nasionalisme yang sempit dan tidak sesuai dengan kenyataan sejarah bangsa Indonesia. Dalam bidang ekonomi, perhimpunan ini mendukung penerapan *affirmative action* terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, tanpa membedakan ras, etnis, gender, agama, keyakinan, maupun kedudukan sosialnya, sebagai kebijakan kondisional dan temporal, menuju terhapusnya kemiskinan dan peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dalam bidang kebudayaan, memperjuangkan penyebaran doktrin *Cross Cultural Fertilization* atau penyerbukan silang antara budaya sebagai wujud penghargaan terhadap pluralisme dan multikulturalisme. Dalam bidang sosial, mendorong terbentuknya yurisdiksi yang mengatur sistem perlindungan sosial, menuju terciptanya sebuah negara kesejahteraan. Perhimpunan ini mendorong terwujudnya pemerataan pendidikan tepat guna yang bercirikan pengembangan nalar dan kreativitas, etika, moral serta memperoleh keterampilan yang diperlukan (*marketable skill*).¹⁰

Sifat perhimpunan ini adalah kebangsaan sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, bebas, egaliter, pluralis, inklusif, demokratis, tidak bernaung dan mengikatkan diri kepada salah satu partai politik dan terbuka bagi semua Warga Negara Indonesia yang setuju kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

¹⁰ *Ibid*, hal. 85

Tangga Perhimpunan. Dengan maksud dan tujuan di bidang sosial, kultural dan idiil. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilakukan di bidang sosial, mendirikan lembaga formal dan non formal, mendirikan panti asuhan, panti jompo dan panti wreda, mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium, mengadakan pembinaan olahraga, mengadakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan mengadakan studi banding. Di bidang kultural, menyelenggarakan kegiatan kesenian antara lain, seni musik, seni tari, paduan suara dan lainnya. Bidang idiil, memberikan pendidikan hukum, ekonomi dan politik dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan.¹¹

Organisasi INTI merupakan kelompok yang ingin menyelesaikan masalah Tionghoa secara *holistic* dengan menghimpun sebanyak mungkin orang-orang Tionghoa ke dalam suatu wadah untuk bersama-sama komponen bangsa lainnya menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia menuju Indonesia “baru” yang adil, makmur dan berperadaban tinggi sehingga dapat bersaing di tengah globalisasi yang sedang melanda dunia.¹² Pendekatan secara holistik tersebut perlu dilakukan karena orang-orang Tionghoa kebanyakan masih bersifat *inward looking*. Sehingga sejak awal perhimpunan INTI menegaskan bahwa penyelesaian apa yang disebut dengan “masalah Tionghoa” hanya bisa diselesaikan melalui kerjasama antara masyarakat Tionghoa dengan berbagai komponen bangsa lainnya.

C. PENGERTIAN NASIONALISME

Nasionalisme dapat didefinisikan dengan berbagai macam cara. Pada awalnya, nasionalisme adalah gagasan mengenai kesatuan kebangsaan dalam suatu wilayah politik kenegaraan. Teori politik membagi manusia ke dalam berbagai bangsa dan nasionalisme sebagai nilai rohaniah yang mendorong kehendak untuk hidup sebagai satu kesatuan bangsa serta mempertahankan kelangsungan hidup

¹¹ *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan INTI* (Jakarta, 2008)

¹² Herdi Sahrasad, *Struktur Kolonial, Etnis Tionghoa dan Kerusuhan Rasial* (Jakarta: Jurnal Universitas Paramadina Vol.5, No.2, Juli 2007), hal. 201-202

kebangsaannya itu.¹³ Menurut David Miller, pengertian Nasionalisme:

*A national identity requires that the people who share it should have something in common, a set of characteristics that in the past was often referred to as a “national character”, but which I prefer to describe as a common public culture. It is incompatible with nationality to think of the members of the nations as people who merely happen to have been thrown together. There must be a sense that the people belong together by virtue of the characteristics that they share. It is not so easy, however, to pin down precisely what this entails. Let me at that stage at least try to guard against certain elementary errors. One is that the shared characteristics must be based on biological descent, that our fellow Nationals must be our kith and kin, a view that leads directly to racism. If what matters to nationality is that people should share a common public culture, then this quite compatible with their belonging to a diversity of ethnic groups. Indeed, it is possible to regard ethnic mixing as the source of the nation’s distinctive character. All that matter is that the melding together of different ‘races’ should have produced a people with a distinct and common character of their own. Equally, although every nation must have a homeland. It is by no means essential that every member should have been born there.*¹⁴

Istilah nasionalisme yang kita gunakan sekarang ini memiliki pengertian: (1) suatu proses pembentukan atau pertumbuhan bangsa-bangsa, yang mencakup serangkaian proses yang lebih khusus dan acapkali membentuk obyek nasionalisme dalam pengertian lain yang lebih sempit. (2) suatu sentimen atau kesadaran memiliki bangsa yang bersangkutan. (3) suatu bahasa dan simbolisme bangsa. (4) suatu gerakan sosial dan politik demi bangsa yang bersangkutan, yang menekankan adanya pencelupan dalam budaya bangsa, yakni penemuan kembali sejarahnya, kebangkitan kembali bahasa daerah melalui disiplin-disiplin filologi dan leksikografi, penggalian sastranya dan pemulihan seni dan kerajinan. (5) suatu

¹³ Munir Mulhan, “Dialog Interaktif Nasionalisme, Agama dan Modernitas”, dalam Ariel Heryanto, *Nasionalisme, Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

¹⁴ David Miller, *On Nationality* (Great Britain: Oxford University Press, 1997), hal. 25

doktrin dan/atau ideologi bangsa, baik yang umum ataupun khusus.¹⁵

Menurut Sartono Kartodirjo, konsep nasionalisme di sini mencakup konsep kepribadian, semacam metafora tentang kolektivitas yang mempunyai karakter seperti seorang individu, yang berlaku juga untuk konsep identitas nasional. Mempersonifikasikan nasyon cukup memudahkan semantik politik disamping pemakaian simbol-simbol atau *image-image* lain yang telah meresap dalam kultur politik modern. Dalam komunikasi politik, konsep-konsep tentang nasionalisme perlu diterjemahkan dengan metafor dan simbol sehingga *image* konkret lebih mudah dapat dipopularisasikan. Tidak dapat diabaikan suatu kenyataan bahwa pada prinsip-prinsip nasionalisme melekatlah paham demokrasi, kualitas hidup (*liberty*) dan keadilan sosial.¹⁶

Nasionalisme lazimnya berawal sebagai ide atau konsep, kemudian para pengembannya berusaha merealisasikan lewat suatu gerakan baik secara evolusioner maupun revolusioner. Nasionalisme dalam konteks kolonial berfungsi sebagai *counterideology* dari kolonialisme. Jika kolonialisme bersifat konservatif, maka nasionalisme secara wajar bersifat antikolonial dan radikal-revolusioner. Sementara itu nasionalisme menunjuk pada suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama yang mencakup berbagai unsur yang berbeda dalam aspek, etnis, kelas atau golongan sosial, aliran kepercayaan, kebudayaan, linguistik dan sebagainya. Kesemuanya terintegrasi dalam perkembangan historis sebagai kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang ditopang oleh kemauan politik bersama.¹⁷

Nasionalisme sendiri memuat hal-hal sebagai berikut: (1) kesatuan (*unity*) yang mentransformasikan hal-hal morfik menjadi monomorfik sebagai produk proses integrasi. (2) kebebasan (*liberty*), khususnya bagi negara-

negara jajahan yang memperjuangkan pembebasan dan kolonialisme. (3) kesamaan (*equality*) sebagai bagian implisit dari masyarakat demokratis yang merupakan antitesa dari masyarakat kolonial yang diskriminatif dan otoriter. (4) kepribadian yang lenyap sebagai negasi kaum kolonial dan (5) prestasi yang merupakan sumber inspirasi dan kebanggaan bagi warga negara nasyon.¹⁸

Menurutnya, nasionalisme terbagi menjadi 4 bagian: (1) nasionalisme barat, yang pada abad ke XIX berkembang bersamaan dengan kapitalisme serta industrialisme yang pada dasarnya saling memperkuat sehingga menimbulkan ekspansionisme yang pada puncaknya menghadirkan kolonialisme dan imperialisme yang ada di dunia ini. (2) nasionalisme ekonomi, muncul karena perebutan daerah jajahan untuk kepentingan industri serta untuk mempertahankan neraca perdagangan yang menguntungkan bagi negara induk dengan menentukan tarif tinggi bagi barang-barang impor. (3) nasionalisme sosialisme, yang muncul pada tahun 1933 dalam bentuk nasionalisme nazi. (4) nasionalisme religius dan, (5) nasionalisme etnis.¹⁹

Muatan nasionalisme resmi menurut Benedict Anderson adalah menatap masa silam sekaligus menghadap ke depan. Bedanya dengan nasionalisme-nasionalisme yang lain adalah antara dusta dan mitos. Segala macam merek terdaftar nasionalisme, dengan umbul-umbul seperti lagu kebangsaan, taman makam pahlawan, bendera nasional dan lainnya menjadikannya lekat dengan nasionalisme. Sebagaimana pernyataan Soekarno bahwa upaya untuk menyuburkan nasionalisme adalah dengan (1) menunjukkan kepada rakyat bahwa hari dahulu adalah hari dulu yang indah. (2) kami menambah keinsyafan rakyat, bahwa ia punya hari sekarang, adalah hari sekarang yang gelap dan, (3) kami memperlihatkan kepada rakyat sirnanya hari kemudian yang berseri-seri dan terang cuaca, beserta cara-caranya mendatangkan hari kemudian yang penuh dengan janji-janji tersebut.²⁰

¹⁵ Anthony D. Smith, *Nasionalisme: Teori, Ideologi dan Sejarah* (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 6-10

¹⁶ Sartono Kartodirjo, "Nationalisme, Lampau dan Kini" makalah dalam seminar tentang nasionalisme Nasionalisme Indonesia menjelang abad XXI yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma di Universitas Kristen Satya Wacana, 2-5 Juni 1993, Salatiga, 1993:4 dalam Dr. H. Roeslan Abdulgani, *Problem Nasionalisme, Regionalisme dan Keamanan di Asia Tenggara* (Salatiga: Universitas Duta Wacana, 1994) hlm. xviii

¹⁷ *Ibid.* hal. xviii

¹⁸ *Ibid.*, hal. xvii

¹⁹ *Ibid.*, hal. xix

²⁰ Benedict Anderson, *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 1999), hal. xxii

Definisi bangsa atau nasion menurutnya adalah komunitas politis yang dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang *imaginer* karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan tak akan kenal sebagian besar anggota yang lain, tidak akan bertatap muka dengan sebagian besar anggota yang lain, bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentangnya. Pada akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas, sebab tidak peduli akan ketidaksetaraan nyata dan eksploitasi yang mungkin lestari dalam tiap bangsa, dimana bangsa itu sendiri dipahami sebagai kesetiakawanan yang mendalam dan arahnya mendarat/horizontal.²¹

Konsep kebangsaan sendiri tidak bisa dipisahkan dengan konsep identitas nasional. Identitas nasional mendorong kita untuk melakukan aktivitas moral yang berkaitan dengan kebangsaan. Dengannya memberikan kepada kita sebuah kewajiban dan tanggungjawab. Sehingga melahirkan sebuah pernyataan bahwa ketika kita melakukan kegiatan moral tersebut, kita bisa dibedakan dengan bangsa yang lain.²² Sementara itu Fukuyama menyatakan bahwa identitas nasional diupayakan untuk merusak ke dalam kehidupan pribadi dan kebudayaan, bukan dipolitisasi dan dijadikan dasar hak hukum.²³ Berkaitan dengan dinamika integrasi nasional, perkembangan nasionalisme, dan dinamika integrasi nasional suatu masyarakat majemuk sangat ditentukan 2 hal: (1) konfigurasi dasar struktur masyarakat yang bersangkutan berdasarkan sejumlah parameter nominal. (2) karakter hubungan antar berbagai parameter struktur sosial ini. Suatu masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang dan masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dinamika integrasi nasional daripada suatu masyarakat dengan minoritas dominan atau masyarakat majemuk yang tersegmentasi.²⁴

²¹ Ibid, hal. 7-9

²²Ross Poole, *Nation and Identity* (London and New York: Routledge, 1999), hlm 74

²³ Larry Diamond, *Nasionalisme, Konflik Etnis dan Demokrasi* (Bandung: ITB, 1998)

²⁴ Nasikun, "Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk" dalam Ariel Heryanto, *Nasionalisme: Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

D. DINAMIKA PERHIMPUNAN INTI

Lantas bagaimana dengan nasionalisme masyarakat Tionghoa di Indonesia? Secara umum, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun orang Tionghoa sendiri untuk mengidentifikasi bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan di Indonesia, banyak orang Cina yang mengganti nama diri dan nama perusahaannya dengan nama yang lazim ataupun tidak lazim di Indonesia. Dalam bidang keagamaan, mereka menganut agama Buddha karena agama tersebut yang paling dekat dengan Samkau (gabungan Konghucu, Laucu dan Budha) dan menggantikan Klenteng dengan Vihara.²⁵

G.W. Skinner mengusulkan menggunakan identifikasi diri bagi anggota-anggota minoritas Tionghoa. Menurut kriteria itu, orang yang mempunyai nama keluarga Tionghoa tentu asal-usulnya Tionghoa.²⁶ Dia memperkirakan pada tahun 1961, ada 2,3 sampai 2,6 juta orang di Indonesia yang memenuhi syarat itu. Sejak tahun 1967 lebih sulit untuk mengidentifikasi warga negara asal Tionghoa secara tepat menurut nama keluarganya karena golongan asal Tionghoa itu telah mengindonesiakan nama mereka. Walaupun dengan adanya perubahan nama tersebut, orang Indonesia asli masih dapat membedakan Tionghoa yang telah berganti nama dengan nama Indonesia dari penduduk asli sehingga mereka bisa dibedakan dalam konteks Indonesia.

Sebagaimana banyak di negara Asia Tenggara lainnya, masyarakat Tionghoa di Indonesia terkenal peranannya sebagai minoritas pedagang, yang pada akhirnya beberapa kasus yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut meluas pada permasalahan budaya, sosial dan politik. Salah satu segi pokok masalahnya berkaitan dengan identitas nasional, yang dihadapkan dengan adanya desakan kuat nasionalisme Indonesia. Dengan adanya isu tersebut, mereka menanggapi dengan cara berbeda-beda. Banyak yang masih ragu-ragu untuk

²⁵ Dr. Gondomono, *Membanting Tulang Menyembah Arwah: Kehidupan Kekotaan Masyarakat Cina* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

²⁶ G.Wiliam Skinner, "The Chinese Minority" dalam Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta Graffiti, 1984), hlm xvii

mengidentifikasi diri dengan berbagai lambang nasional Indonesia. Beberapa mencoba mempertahankan identitas kesukuannya sambil tetap menjadi anggota dari bangsa Indonesia yang baru.²⁷

Dari hasil penelitian Hari Poerwanto dapat digunakan untuk mengukur derajat nasionalisme masyarakat Tionghoa di Indonesia. Menurutnya, para responden memiliki bentuk gambar, foto, lukisan dan patung yang berhubungan dengan kebudayaan, peristiwa, tokoh, alam sekitar yang ada di negara leluhurnya misalnya, bintang film mandarin, gambar pemandangan, lukisan tradisional Cina, gambar benda dan bangunan bersejarah di China yang diperoleh dari kalender atau iklan produk tertentu. Demikian halnya dengan foto dan gambar penyanyi Indonesia dan dari negara Eropa-Amerika. Di samping itu gambar presiden dan wakil presiden serta lambang negara Bhineka Tunggal Ika, banyak terdapat di rumah responden. Termasuk penggunaan bahasa Indonesia yang hampir seimbang dengan bahasa China yang lain (Khek, Teochiu, Hokkian dan Hwa Yu).²⁸ Fakta ini menunjukkan Etnis Tionghoa berupaya mengidentifikasi kepribadian Indonesiannya kepada etnis lain yang ada di Indonesia. Bahwa mereka juga bagian yang tidak terpisahkan dari nasionalisme Indonesia. Terlepas dari adanya berbagai macam cibiran yang dialamatkan kepada mereka bahwa apa yang dilakukannya itu sudah seharusnya sebagai pendatang yang minoritas. Ditambah dengan adanya fakta keterikatan mereka yang sangat kuat dengan budaya nenek moyangnya yang selalu dilestarikan dengan berbagai macam metode.

Berkaitan dengan komunitas INTI, yang merupakan salah satu organisasi dengan jumlah yang besar, kegiatan yang dilakukan sangat banyak dan bervariasi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi organisasi tersebut dan secara langsung ataupun tidak langsung menunjukkan bagian dari bangkitnya rasa nasionalisme komunitas Tionghoa. Berbagai macam kegiatan tersebut dilakukan melalui hubungan baik dengan jajaran pemerintahan, perhimpunan ini

²⁷ Ibid, hal. xx

²⁸ Hari Poerwanto, *Orang China Khek dari Singkawang* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hal.166

berpartisipasi dengan berbagai macam kegiatan terkait dengan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum, diantaranya dengan mendukung Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengkajian Hubungan antara keterlibatan warga negara keturunan Tionghoa sebagai PNS dengan hak sipil dan politik dan pemenuhan HAM dalam pengurusan paspor bagi WNI keturunan Tionghoa. Selain itu juga adanya dengar pendapat dengan Pansus RUU penghapusan diskriminasi dan Pansus RUU Kewarganegaraan DPR RI pada tahun 2006. Selain itu, dalam kegiatan Hukum, Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia mereka mensosialisasikan eksistensi Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) menyusun, menerbitkan dan meluncurkan buku *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie: Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*, serta mensosialisasikan Undang-Undang Kewarganegaraan 2006 melalui seminar, diskusi, pencetakan booklet dan mendistribusikan *softcopy* Undang-Undang tersebut ke berbagai milis di dunia maya. Upaya yang dilakukan tersebut merupakan usaha untuk proses penyusunan dan sosialisasi peraturan perundangan, penegakan hukum dan kampanye hak azasi manusia dan hak-hak sipil warga negara. Selain itu kiprah di bidang hukum, juga mendirikan klinik konsultasi hukum dengan cakupan layanan adalah menyediakan layanan konsultasi hukum cuma-cuma bagi masyarakat, yang tidak terbatas pada anggota perhimpunan INTI semata tetapi untuk masyarakat yang lebih luas.

Sebagai sebuah yayasan yang bersifat etnis, Perhimpunan INTI membuka diri, menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan berbagai macam kelompok pada skala nasional ataupun Internasional. Pada level nasional, INTI bekerjasama dengan berbagai macam organisasi, diantaranya: Organisasi Tionghoa: Yayasan Nusantara Sejahtera, Perguruan Setia Bakti. LSM: The Wahid Institute, Yayasan Air Putih, Jaringan Islam Liberal. Pusat Penelitian: CSIS, Soegeng Soerjadi Institute, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Lembaga Negara: Sekretaris Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri. Organisasi Keagamaan: PB NU,

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Walubi. Pada level Internasional mereka bekerjasama dengan Kedutaan Asing, Organisasi Internasional dan Lembaga Bisnis.²⁹

Sebagai kelompok masyarakat dengan jaringan ekonomi dan bisnis, INTI memandang kebangkitan ekonomi Indonesia erat kaitannya dengan kestabilan dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, organisasi ini aktif dalam bidang bisnis dan ekonomi melalui berbagai kegiatan dan pembentukan Komite Perdagangan dan Industri. Pada tahun 2000, kerjasama dan MoU dengan *The Associated Chinese Chamber of Commerce and Industry of Malaysia* (ACCCIM) yang dilanjutkan dengan pertemuan dengan perwakilan dagang Taiwan. INTI juga dapat mengkoordinasikan 75 orang pengusaha Indonesia untuk menghadiri *World Chinese Entrepreneurs Convention* di Nanjing, China dalam rangka membina persahabatan dan pengenalan bisnis. Kegiatan lain yang dilakukan adalah menyelenggarakan seminar bertajuk bisnis dan ekonomi, seperti *Bedah Buku Filosofi Kuno dan Manajemen Modern* karya Mochtar Riyadi (2007), seminar UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (2007), seminar *Family Business* (2008), *Financial Tsunami: Global Changes vs Our Choices-The American Crisis Impact* (2008), *Bisnis dan Korupsi* (2008), *Economic Outlook 2009* dan *Growing and Staying Up*. Pada tahun 2007, INTI membentuk komite perdagangan dan industri (*Commerce and Industrial Council-CIC*) serta *Young Entrepreneur Council (YEC)*, dimana secara langsung CIC menyelenggarakan Konvensi Bisnis Internasional Tionghoa Sedunia bersama dengan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) dan *World Eminence Chinese Business Association (WECBA)*.³⁰

Menyikapi berbagai macam bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia, INTI juga melakukan penyaluran bantuan bagi korban bencana Maluku (Juni 2000), berpartisipasi dalam misi kemanusiaan penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa dan tsunami di Aceh, Medan, Nias (2004/5), pengiriman tim relawan dan medis dalam rangka misi kemanusiaan pasca gempa bumi di Yogyakarta (2006), bekerjasama dengan PERMATA

(Persatuan Masyarakat Indonesia Tionghoa Peduli Bencana) menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang di Sinjai, Sulawesi Selatan (2006), bekerjasama dengan PERMATA, Majelis Agama Khonghucu Indonesia Banjar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pangandaran, Kopassus dan Pergerakan Indonesia menyalurkan bantuan bagi korban Tsunami di Pangandaran, Jawa Barat (2006) dan sebagai tindak lanjutnya mengadakan *fund raising* untuk pengadaan tenda sekolah di Yogyakarta dan Sinjai. Terjun langsung dalam membantu korban bencana banjir yang melanda Jakarta (2007), korban kebakaran Suku Baduy-Banten (2007), bantuan medis bagi korban gempa di Padang (2007) dan bantuan sandang-pangan bagi korban longsor Manggarai, Nusa Tenggara Barat (2007). Terlibat aktif juga dalam penanganan bencana alam gempa bumi di Bengkulu dan Kepulauan Mentawai (2007).

Selain misi kemanusiaan tanggap bencana, sejak tahun 2000, Perhimpunan ini mengadakan aksi sosial rutin seperti layanan medis, pemeriksaan gigi, khitanan massal, pemeriksaan mata dan pembagian kaca mata baca, melakukan sejumlah operasi gratis untuk kasus-kasus berat pada masyarakat pra sejahtera, melakukan program perbaikan sekolah dan bantuan alat sekolah, menunjang perpustakaan desa dan membagikan paket-paket sembilan bahan pokok di sejumlah kawasan: Jabodetabek, Aceh, Kep. Riau, Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, kawasan lumpur Lapindo-Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Layanan kesehatan ini ditujukan bagi warga yang kurang mampu di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu, penanganan gizi buruk dilakukan di Belu, NTT dan Maluku Tenggara.³¹

Perhimpunan INTI menyadari sepenuhnya bahwa pola pikir yang terbuka, komprehensif, tanggap akan perubahan dengan latar belakang pengetahuan yang cukup, adalah kunci penting bagi akselerasi kemajuan bangsa ini. Semua hal tersebut dapat dicapai dengan pendidikan yang berkualitas dan bisa diakses semua warga bangsa. Sejumlah MoU dengan universitas ditandatangani dalam upaya pengembangan pendidikan: Universitas Sumatera Utara, UMY, UGM, Universitas Hasanuddin, dan UIN Syarif

²⁹ Buku Kenangan: Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia-Tionghoa: Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan, 1999-2009 (Jakarta:Perhimpunan INTI, 2009), hal. 115

³⁰ Ibid, hal. 135

³¹ Ibid, hal. 148

Hidayatullah Jakarta. Beberapa kegiatan pendidikan yang dilakukan adalah: penerbitan buku-buku, lomba menulis puisi dan cerpen. Donasi pendidikan: UKM Universitas Hasanudin, Fakultas Sastra UI, SMU Setia Bhakti, Tangerang dan Universitas Al Azhar, Jakarta. Seminar-diskusi dan bedah buku, mendirikan program beasiswa INTI-Pelangi untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah di kalangan remaja, kegiatan lapangan bersama dengan sejumlah Universitas. INTI juga memberikan bantuan dan program rehabilitasi perbaikan gedung sekolah dan perpustakaan: SMU Setia Bhakti, Tangerang, Fakultas Sastra UI, Warung Baca Lebak Wangi-Bogor, Pusat Pemberdayaan anak dan perempuan. Tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan bahasa Mandarin untuk kepentingan studi, karier, hubungan Internasional dan bisnis merupakan perkembangan yang positif bagi kemajuan Indonesia. Upaya yang dilakukan INTI adalah mengajukan usulan standarisasi metode pengajaran Bahasa Mandarin kepada delegasi pengajar Bahasa Mandarin dari Beijing.

Tak hanya pendidikan dalam lingkup sekolah, INTI juga konsisten mengadakan seminar, diskusi dan bedah buku sebagai wahana pembelajaran politik bagi khalayak ramai dengan menghadirkan pembicara yang kompeten, terbuka bagi anggota ataupun non anggota tanpa pungutan biaya, diakses dan dipublikasikan melalui media massa dimana harapannya melalui kegiatan ini dapat membuka cakrawala pemahaman sebanyak-banyaknya terhadap peta kondisi bangsa ini dan posisi masyarakat Tionghoa sebagai integral yang tidak bisa dipisahkan. Beberapa topik yang pernah menjadi tema dalam kegiatan tersebut antara lain: partisipasi sosial politik Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Indonesia Baru, Sidang Istimewa MPR dan agenda menyelamatkan bangsa, Integrasi Etnis Tionghoa ke dalam *mainstream* Masyarakat Indonesia, Antisipasi menghadapi krisis pangan dunia dan kontestasi politik, *Financial Tsunami: Global Changes vs Our Choices-The American Crisis and It's Impact* dan lainnya.³²

Dengan berlatar-belakang ungkapan bahwa melintasi batas identitas sosial, seni dan olahraga sebagai ekspresi cipta, rasa dan karsa budaya

merupakan sarana efektif untuk merajut persahabatan dan persaudaraan, INTI juga melakukan kegiatan seni dan olahraga yang memungkinkan dapat mengenal lebih dekat budaya, karakter dan nilai-nilai yang dianut sekelompok masyarakat. Kegiatan yang pernah dilakukan: Pekan Budaya Peranakan Tionghoa bekerjasama dengan Mitra Museum Indonesia (2000) dan Pekan Budaya dan Pameran Persatuan Nasional bekerjasama dengan Sekretariat Negara (2000). Pada tahun 2007, INTI bekerjasama dengan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa mengadakan pementasan seni "Indonesia Nigt" di Beijing dan Jinan, RRT yang mendapat dukungan dari pemerintah RI, KBRI Beijing, Pemerintah RRT dan Pemerintah Daerah Provinsi Shandong. INTI juga mengirimkan kelompok tari tradisional Sumatera Utara dalam China ASEAN EXPO (CAEXPO) ke-4, Nanjing, China tahun 2007 untuk mendukung pariwisata Indonesia dan membantu terlaksananya penandatanganan kesepakatan kerjasama antara dinas Pariwisata Guangdong dengan Departemen Kebudayaan dan pariwisata RI.³³

Bidang kegiatan yang juga disasar oleh INTI adalah peningkatan peranan perempuan mengingat pentingnya peran perempuan dalam memperkuat keluarga dan berkarya di tengah masyarakat. Melalui Perempuan INTI (PINTI), kaum perempuan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan: seni budaya, kesehatan, sosial kemanusiaan, hukum, HAM dan lainnya. Pada tahun 2008, PINTI bekerjasama dengan Komnas Perempuan menggelar peringatan hari Ibu dan HAM yang dimeriahkan dengan pagelaran seni. PINTI rutin melakukan forum, seminar dan talkshow dengan berbagai macam tema: pengetahuan dan status wanita, peranan wanita dalam globalisasi perkembangan ekonomi dan peningkatan wawasan. Selain itu juga aktif mengadakan kegiatan sosial: panen raya petani Sagatani, Singkawang bersama dengan masyarakat Dayak dan Tionghoa, Lomba kebersihan Jawa Barat yang diikuti 700 SD di 30 Kecamatan di Jawa Barat, menggelar donor darah untuk Palestina dan pasar murah (2009) serta menyalurkan bantuan untuk misi kemanusiaan penanggulangan busung lapar dan

³² Ibid, hal. 162

³³ Ibid, hal. 173

malnutrisi di NTT dan Pulau Kei Besar (2008-2009)

Berbagai macam bentuk kegiatan tersebut tidak bisa dipisahkan dari keberadaan sebuah organisasi minoritas yang berupaya mengidentifikasi bahwa dirinya eksis di tengah berbagai macam tekanan dari etnis lain yang lebih mayoritas. Menurut Fukuyama, mereka berupaya melakukan integrasi dengan identitas nasional dengan menggunakan berbagai macam atribut yang bernuansa nasional. Termasuk kesadarannya menggunakan bahasa dan simbol-simbol yang digunakan oleh bangsa Indonesia dengan sesungguhnya atau secara formal untuk menunjukkan bahwa mereka bagian dari identitas nasional. Hal paling penting yang mereka lakukan kemudian adalah membangun gerakan sosial dan politik yang tidak bisa dipisahkan dengan identitas itu sendiri. Hal luar biasa yang nampak adalah berbagai macam prestasi yang dicapai oleh etnis Tionghoa di bidang ekonomi-bisnis, musik, olahraga dan politik dengan mengangkat nama Indonesia di tingkat internasional. Keberhasilan ini bisa menjadi salah satu contoh keberhasilan teori *melting pot* yang menjelaskan bahwa persatuan nasional yang muncul dari berbagai macam ideologi. Ideologi baru, diyakini mampu menyatukan semua kelompok yang terpisah dengan meleburnya menjadi satu kekuatan yang kohesif menjadi identitas nasional. Yang dimaksud ideologi baru tersebut adalah ideologi nasionalisme, Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempersatukan 101 etnis yang ada di Indonesia.

E. PENUTUP

Nasionalisme sebagai sebuah konsep, digambarkan oleh Benedict Anderson sebagai sesuatu hal yang bersifat *imaginer*. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat membakar jiwa seseorang untuk mengorbankan apa yang dimilikinya, termasuk nyawa sekalipun. *Keimagerannya* pun menjadikan seseorang awam tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya sebagai sebuah bentuk tindakan yang disebut nasionalisme. Untuk mengindikasikan secara sederhana apakah tindakan seseorang tersebut disebut sebagai

nasionalis ataukah tidak dapat kita ketahui dari simbol-simbol yang digunakannya.

Gempuran modernisasi dan globalisasi yang melanda dunia, sedikit demi sedikit telah menggeser derajat nasionalisme yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang mampu menghubungkan seluruh penduduk dunia dengan tanpa mengenal batas-batas negara yang dimilikinya. Tentunya gempuran itu melanda tidak memandang penduduk asli ataupun imigran di suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa makna nasionalisme harus dimaknai secara lebih luas.

Bagi etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengingat rasa *chauvinistik* yang tinggi terhadap leluhurnya yang dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan masyarakat pribumi. Kesadaran diantara kedua belah pihak harus berjalan seiring sejaan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan. Dalam bentuk saling menghargai keberadaan dan menjalin kerjasama diantara kedua belah pihak, termasuk aktivitas yang disebut sebagai tindakan nasionalis.

Tindakan nasionalis etnis Tionghoa, salah satunya anggota Perhimpunan INTI dapat dilihat dari berbagai macam program dan kegiatan yang dilakukannya. Mulai dari kegiatan ekonomi, hukum dan politik, seni dan budaya, pemuda dan olahraga ataupun upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan di Indonesia. Pada awalnya memang berbagai aktivitas tersebut terjadi pada lingkup sempit, untuk kalangan masyarakat Tionghoa sendiri. Akan tetapi pada ranah yang lebih luas, aktivitas tersebut meluas untuk kepentingan masyarakat Indonesia lain yang membutuhkan. Mulai dari kerjasama dengan pemerintah China tentunya berdampak bagi relasi antara kedua negara sampai dengan pemberian bantuan sembako bagi masyarakat yang kekurangan pangan (malnutrisi) di Indonesia. Identitas nasionalisme dimana mereka tinggal mulai muncul dengan berbagai macam bentuk, yang diwujudkan dalam bentuk kesadaran dan berbagai macam gerakan sosial dan politik.

Hal tersebut tentunya perlu memberikan kita pembelajaran bahwa sekecil apapun perilaku seseorang yang membawa kemajuan kepada bangsa ini tentunya harus kita hargai sebagai perilaku nasionalis tanpa memandang apakah pribumi ataukah imigran, etnis Tionghoa salah satunya. Selain itu menjadi catatan penting dalam penumbuhan rasa nasionalisme tersebut harus selalu memelihara ideologi nasional, yakni

Bhineka Tunggal Ika, berbeda tetap satu juga. Hal ini perlu disosialisasikan secara terus menerus kepada generasi penerus bangsa. Walaupun sulit untuk mewujudkannya, akan tetapi bukan hal yang mustahil jika semua komponen bangsa, termasuk berbagai macam etnis yang ada dari Sabang sampai Merauke berupaya dengan keras mewujudkannya.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 1999.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan INTI. Jakarta: Perhimpunan INTI, 2008.
- Buku Kenangan: Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia-Tionghoa: Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan, 1999-2009. Jakarta: Perhimpunan INTI, 2009.
- Diamond, Larry. *Nasionalisme, Konflik Etnis dan Demokrasi*. Bandung: ITB, 1998.
- Gondomono. *Membanting Tulang Menyembah Arwah: Kehidupan Kekotaan Masyarakat Cina*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Kartodirjo, Sartono. "Nasionalisme, Lampau dan Kini" makalah dalam seminar tentang nasionalisme, Nasionalisme Indonesia menjelang abad XXI yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma di Universitas Kristen Satya Wacana, 2-5 Juni 993, Salatiga, 1993:4 dalam Dr. H. Roeslan Abdulgani, *Problem Nasionalisme, Regionalisme dan Keamanan di Asia Tenggara*. Salatiga: Universitas Duta Wacana, 1999.
- Miller, David. *On Nationality*. Great Britain: Oxford University Press, 1997.
- Mulkhan, Munir. "Dialog Interaktif Nasionalisme, Agama dan Modernitas" dalam Ariel Heryanto, *Nasionalisme, Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasikun, "Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk" dalam Ariel Heryanto, *Nasionalisme: Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996.
- Poerwanto, Hari. *Orang Cina Khek dari Singkawang*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2005.
- Poole, Ross. *Nation and Identity*. London and New York: Routledge, 1999.
- Purcell, Victor. *The Chinese in Southeast Asia*. London: Oxford University Press, 1994.
- Sahasrad, Herdi. "Struktur Kolonial, Etnis Tionghoa dan Kerusuhan Rasial", Jakarta, *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol.5, No.2, Juli 2007
- Skinner, G.Wiliam. "The Chinese Minority" dalam Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti, 1984.
- Smith, Anthony D. *Nasionalisme: Teori, Ideologi dan Sejarah*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Wang, Gung Wa. *A Short History of The Nanyang Chinese*. Singapore: Eastern University, 1959.
- Wertheim, W.F,1994. "Indonesia Society in Transition". Bandung: Sumur Bandung, 1956 dalam Amri Marzali, *Kesenjangan Sosial Ekonomi antar golongan Etnis: kasus China-Pribumi di Indonesia*, Majalah PRISMA, no.12 tahun 1994
- Wiliam, Skinner, G. *Report on The Chinese in Southeast Asia*. New York: South East Asia Program Department of far Eastern Studies, 1950.

INDEKS PENULIS

A

Ali Romdhoni

Pendiri lembaga kajian *Literatur Nusantara* di Jakarta, dan dosen di STAI Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah. Tinggal di Desa Prawoto, Sukolilo, Pati. Email: ali_romdhoni@yahoo.com
"STRATEGI PESANTREN MENGHADAPI PERUBAHAN MASYARAKAT"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 97-108

D

Dimiyati Sajari

Dosen "Ilmu Pemikiran Islam" Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412. Email: dimyatisajari@yahoo.com.
"DZIKIR: MAKANAN SPIRITUAL SANG SUFI"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 1-12

F

Fachry Ali

Direktur Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEU), Jakarta. Email: fachryali@gmail.com.
"BASIS STRUKTUR SOSIAL PEMIKIRAN ISLAM AWAL, PENGARUH AGAMA DAN RENUNGAN DEWASA INI"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 33-48

G

Gazi Saloom

Dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Fakultas Psikologi UIN Jakarta, Jl. Kertamukti 5 Cirendeui, Jakarta Selatan 15419. Email: thesaloom@gmail.com.
"MENINGGALKAN JALAN TEROR: ANTARA DERADIKALISASI DAN DISENGAGEMENT"
Jurnal Dialog vol..37, No.1, Juni 2014. hal: 109-120

H

Husni Mubarak

Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, Bona Indah Plaza, Blok A2 No. D 12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel 12440. E-mail: husni@paramadina-pusad.or.id
"MENCEGAH ESKALASI KONFLIK KEAGAMAAN: STUDI KASUS NATAL BERSAMA DI UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH "
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 49-60

M

M. Atho Mudzhar

Guru besar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: athomudzhar@yahoo.co.id.
"PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN ENAM NEGARA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 87-96

Muhammad Isnur

Advokat/Pengacara Publik, dan *Researcher* pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
"POTRET KEBERHASILAN PEMOLISIAN DI INDONESIA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 121-126

Muryanti

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga. Jl. Marsda
Adisucipto No. 1 Yogyakarta. Alamat Email: newsyant@yahoo.com
"NASIONALISME DALAM PANDANGAN ETNIK MINORITAS DI YOGYAKARTA: STUDI KASUS
ANGGOTA PERHIMPUNAN INDONESIA-TIONGHOA/INTI YOGYAKARTA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal:75-86

N

Nuruddin

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian
Agama Republik Indonesia. Jln. M.H. Thamrin 6 Jakarta, Tel. +6221 3920379 Email:
dklaros@yahoo.com
"PERKEMBANGAN MADRASAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM BINGKAI PENELITIAN"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 61-74

R

Rumadi

Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior the Wahid Institute. Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang
Selatan 15412. Email:arumadi@yahoo.com
"FIKIH HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA: FATWA NU,
MUHAMMADIYAH DAN MUI TENTANG RELASI MUSLIM DAN NON-MUSLIM"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 13-32

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago
Contoh:

Buku (monograf)

Satu buku

Footnote

1. Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Bibliografi

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

7. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
8. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
9. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Abas Jauhari, M.Sos

HP: 0856 8512504

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

